

LKIP DINAS TENAGA KERJA 2023



BEKASIKOTA.go.id

Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera & Ihsan

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2023 menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja Dinas yang telah dicapai baik mencerminkan keberhasilan dan kegagalan rupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam LKIP ini. Melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana. Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya 50% (Permenpan No. 54 tahun 2014). Adapun capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan **"BAIK"** dengan rata-rata capaian 100 % dari target yang telah ditetapkan. Dari empat indikator sasaran yang ditetapkan tiga sasaran strategis diantaranya memiliki angka capaian di atas 100%, yaitu :

1. Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
2. Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja,
3. Persentase tenaga kerja yang kompeten yang siap ditempatkan; dan
4. Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja.

Untuk Indikator Tujuan **Meningkatnya nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja** diturunkan dalam sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan** dengan indikator sasaran **Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja** dan **Indeks Kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja**.

Capaian Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja pada Tahun 2022 belum tercapai dimana target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja sebesar 80 poin terealisasi sebesar 64,22. Jika dipersentasekan capaian

Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja sebesar 80,28%. Meski secara presentase capaian berada pada **Kategori Tinggi** tetapi secara capaian, Indikator AKIP Dinas Tenaga Kerja belum tercapai. Sedangkan untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga kerja pada tahun 2022 sudah tercapai hal ini dapat dilihat dari pencapaian target indikator sebesar 89 terealisasi 89. Artinya indikator sasaran untuk indeks kepuasa masyarakat sudah tercapai 100%.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selanjutnya adalah **Tingkat Pengangguran Terbuka** dimana pada tahun 2022 rencana pencapai target adalah 8,79. Menurut BPS telah mencapai 8,81. Terjadi peningkatan sebanyak 0,02 persen, meskipun terjadi peningkatan hanya 0,02 persen namun secara capaian terhadap target masih belum tercapai. Pencapaian **Tingkat Pengangguran Terbuka** Kota Bekasi tahun 2022 tercapai 98,97% dari target.

Indikator Sasaran dalam **Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja siap ditempatkan** yang dalam pengukurannya diterjemahkan dalam Indikator **Presentase Tenaga Kerja Yang Berkompeten Yang Siap Ditempatkan**. Pada Tahun 2022 direncanakan dengan target 20 persen dan terealisasi sesuai dengan target artinya indikator **Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten** yang siap ditempatkan sudah tercapai.

Menurunnya Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja dijelaskan dan diukur dalam indikator **Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja**. Pada Tahun 2022 capaian indikator penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja tercapai sesuai dengan target yaitu 100%. Berikut merupakan rekap Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2023 (capaian sampai dengan tahun 2022).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PERSENTASE
		2022	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	80	64,22	80,28%
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	89	89	100,00%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,79%	8,81%	99,77%
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	20%	20%	100,00%
Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja	100%	100%	100,00%

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas perkenan-Nya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Penetapan Kinerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, serta penjelasan tentang kinerja, capaian dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, hal ini merupakan wujud dari keinginan Dinas Tenaga Kerja untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*. Namun demikian ditingkatkan dalam upaya kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kota Bekasi.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

Drs. AS/P GUNAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660320 198603 1 011

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja	4
1.5 Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2023	7
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2023	12
3.2 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja	13
3.2.1 Analisa Realisasi Kinerja	13
3.3 Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	16
3.4 Analisa Program-Kegiatan-Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran	17
3.5 Analisa Atas Efisiensi Sumber Daya	20
3.6 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	25
1.1 Kesimpulan Umum Pencapaian Kinerja	25
1.2 Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2023	4
Tabel 1.2	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang periode Januari-Desember 2023	4
Tabel 1.3	Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2023	4
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja	9
Tabel 2.3	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	14
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	14
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2022	17

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2023, yaitu: **Meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.**

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2018 - 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong Memuaskan 1 (satu) indikator tergolong Memuaskan dan 1 (satu) indikator lagi juga sama Memuaskan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan mendapat predikat nilai Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Memuaskan juga.
- Sasaran 3 : Menurunnya sengketa perusahaan dengan pekerja mendapat predikat nilai Memuaskan. Hal ini dapat

dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1 (satu) indikator capaian diatas target dan 3 (tiga) indikator sesuai target. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternatif dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 100% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 17.606.113.458,- dan Belanja Modal sebesar 0% atau sebesar Rp.-.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.868.060.040,- atau 90,13% dari pagu anggaran (Rp. 17.606.113.459,-). Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan anggaran yang terserap disesuaikan dengan kegiatan yang telah terlaksana. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Adanya kegiatan yang belum maksimal di dukung anggaran.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya.
3. Kurangnya sarana prasarana fasilitas penunjang kegiatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Adanya dukungan anggaran yang memadai
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai kualifikasi.

3. Tersedianya sarana prasarana fasilitas penunjang kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja sebagai berikut :

- (1) Dinas Tenaga Kerja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

(4) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (3) , Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

(5) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS TENAGA KERJA

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja terdiri dari ASN dan Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja :

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	4	
4	Kasubbag	2	
5	Fungsional tertentu	19	
6	Fungsional Umum	18	
Jumlah		45	

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV /c	1
2	Pembina Tingkat I	IV /b	2
3	Pembina	IV /a	13
4	Penata Tingkat I	III/d	13
5	Penata	III/c	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
7	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8	Pengatur Muda	II/b	1
Jumlah			45

Tabel 1. 3 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	ASN	Non ASN
1	SMA/SMK	5	9
2	D2	2	-
3	D3	2	5
4	S1	18	18
5	S2	18	2
Jumlah		45	34

1.5 ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, yaitu:

1. Optimalisasi pembentukan LKS Bipartit di perusahaan.
2. Kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar.
3. Optimalisasi tingkat produktifitas tenaga kerja di perusahaan.
4. Pengembangan Aplikasi Sistim Informasi Ketenagakerjaan Terpadu.
5. Perluasan dan sosialisasi program pemagangan di wilayah Kota Bekasi.
6. Penyediaan layanan terpadu bagi calon pekerja migran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi , penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) serta tujuan ke 2 (dua) yaitu :

- 1) Misi ke- 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Sasaran Strategis Kota : Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan.
- 3) Misi ke-3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 secara terperinci sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan
Indikator Tujuan : Pencari Kerja Yang Ditempatkan.

Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	77.22	77.78	80	80	82
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	80,12	87,98	87,99	89	89
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	9.07%	8,96%	8,96%	8,79%	8,72%
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	20%	20%	20%	20%	20%
Menurunnya sengketa pengusaha dengan	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

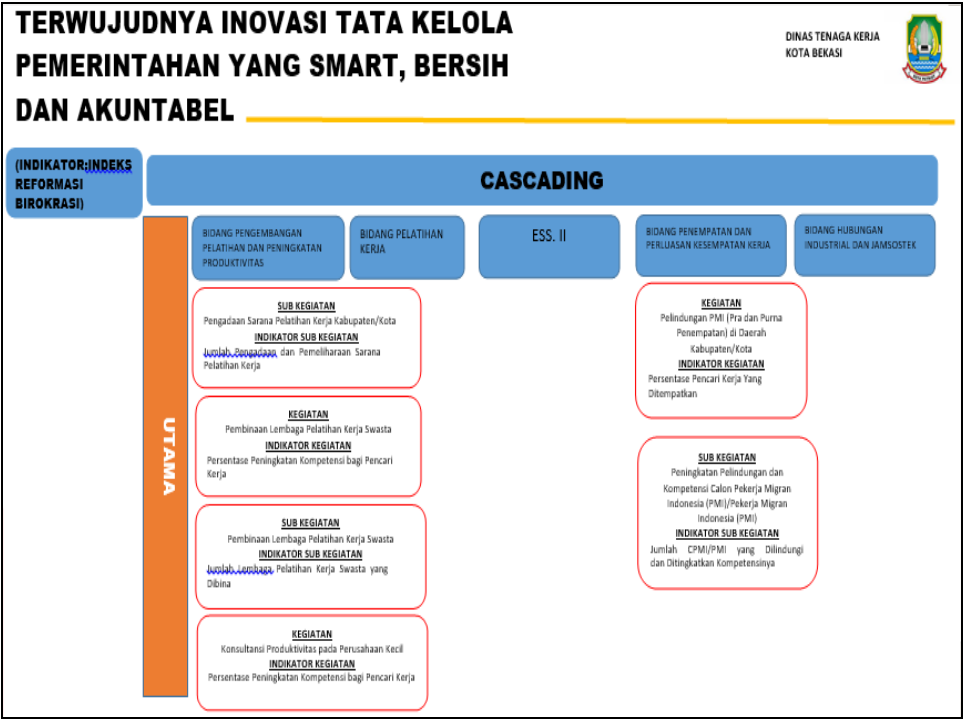
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Tenaga Kerja Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target

sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Cascading Kinerja Perencanaan Dinas Tenaga Kerja

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor: 680/415 Disnaker.Set Tahun 2023 :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator tujuan	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
					ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Meningkatnya nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	1 Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	%	Dasar Hukum Nilai SAKIP dari Permenpan 12 tahun 2015	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)	Sekretariat	Dinas Tenaga Kerja
			2 Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	%	Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB nomor 14 tahun 2017	Jumlah rata-rata tertimbang dikali 25 (kuisioner)		Bidang Penempatan Bidang Hubungan Industrial
		Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka		1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah penduduk x 100 %	Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Pengembangan	
2	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan		2. Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan		2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah lapangan kerja baru yang produktif : jumlah lapangan kerja baru x 100	Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap LPK dan BLK di Kota Bekasi serta Pembuatan kartu AKI, Bursa Kerja Online, Bursa Kerja Khusus, Wajib Lapor Lowongan dan Wajib Lapor Penempatan
					3 Program Visi Misi Wali Kota tentang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja			
3	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja		Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja	%		Jumlah Kasus yang terselesaikan : jumlah kasus yang tercatat	Bidang Hubungan Industrial	Permohonan pencatatan kasus dan monitoring dan evaluasi

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2023.

Tabel 2. 3 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PAD/DAU/HIBAH/dll)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 25.000.000	APBD
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.288.669.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 5.000.000	APBD
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 528.725.000	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000	APBD
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 35.000.000	APBD
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 16.000.000	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 400.000.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.214.336.280	APBD
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 200.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 20.000.000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 150.000.000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 200.000.000	APBD
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 1.074.450.000	APBD
2	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga	Rp. 19.455.000	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
	Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		
3	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Rp. 66.450.000	APBD
4	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 173.600.000	APBD
III.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Rp. 109.020.000	APBD
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 97.385.000	APBD
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp. 51.890.000	APBD
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan		
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 322.019.000	APBD
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 84.679.000	APBD
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 119.415.000	APBD
JUMLAH		Rp. 17.251.093.280	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Tenaga Kerja didukung dengan anggaran 5 (Lima) Program tahun 2023 sebesar Rp 17.251.093.280 ,- (terbilang : Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh satu sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Tenaga Kerja dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Tenaga Kerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	80 - 90	Memuaskan
3	BB	70 - 80	Sangat Baik
4	B	60 - 70	Baik
5	CC	50 - 60	Cukup (mamadai)
6	C	30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

- 2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
- 3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah

kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA

3.2.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2018-2023 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (Satu) Tujuan, 2 (Dua) sasaran dan 3 (Tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 3. 1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan.	1 Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	100%	100%	100%
		2 Pencari kerja yang ditempatkan	1.000 Orang	1.951	123%
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1 Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	86%	86,67%	100%

Sumber Data: Bidang Pembinaan, Pelatihan TK, & Perluasan KK, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (3) Tiga indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja rata rata mencapai 100 % dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam Bidang Pembinaan, Pelatihan TK, & Perluasan KK, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi

seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2018 -2023.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	80	80	64,22	61,64
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	89	89	89	89
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,79%	8,72%	8,81%	7,09%
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	20%	20%	20%	20%
Menurunnya sengketa pengusaha dengan	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	100%	-	Bid.Pembi naan,Pelat ihan Tk,dan Perluasan kesempat an kerja
		Pencari kerja yang ditempatkan	1.523	-	
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100%	-	

Sumber Data: Bidang Penempatan dan Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Pada tabel 3.1 untuk sasaran strategis 1 terdapat 2 (dua) indikator yaitu "Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi" menunjukkan realisasi 100% karena seluruh peserta yang dilatih telah tersertifikasi kompetensi dasar sehingga capaiannya pun menjadi 100% dan "Pencari kerja yang ditempatkan" menunjukkan realisasi 1.523 orang yang ditempatkan di mana terdiri dari angkatan kerja lokal (AKL) angkatan kerja antar daerah (AKAD).

Pada tabel 3.2 dimana pada indikator "Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi" nampak realisasinya sama dengan tahun sebelumnya (2022), sedangkan indikator "Pencari kerja yang ditempatkan" hasil realisasinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2022).

Sedangkan pada tabel 3.4 kami belum mendapatkan data hasil realisasi nasional.

Sasaran Strategis 2 :

- Pada tabel 3.1 untuk sasaran strategis 2 memiliki indikator "Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan" dimana realisasinya melebihi target yang ditentukan.
- Pada tabel 3.2 realisasi memenuhi target sebanyak 100%.

- Pada tabel 3.3 realisasi pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022.
- Pada tabel 3.4 sama seperti sasaran strategis 1, kami belum mendapatkan data hasil realisasi nasional.

3.3 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Sasaran/ Indikator Sasaran	%	Predikat						
	Capaian	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1								
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	64,22	-	-	-	√	-	-	-
Sasaran 2								
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan	100%	√	-	-	-	-	-	-
Sasaran 3								
Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	100%	√	-	-	-	-	-	-
Rata rata capaian		√						

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam kategori Memuaskan.

Sasaran Strategis 1 : Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja terdapat kendala Laporan dan Data yang belum selaras antara indikator ini Kedepanya Dinas Tenaga Kerja berusaha meningkatkan nilai Akip dapat memenuhi bahkan melebihi target salah satu penyebabnya karena kegiatan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

indikator ini yang mempunyai tanggung jawab adalah 3 (tiga) bidang ,bidang pelatihan.bidang produktivitas dan bidang penempatan untuk pencapaian target.

Sasaran Strategis 3 : Penyebab hasil yang memuaskan dikarenakan kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dapat ditangani secara optimal sehingga penyelesaiannya pun terbilang juga tinggi.. Belum optimalnya penyelesaian kasus dikarenakan belum adanya titik temu antara pekerja dan perusahaan. Kedepanya Dinas Tenaga Kerja akan berusaha untuk berkomunikasi dengan wakil dari pihak pekerja (SP/SB) dan pihak perusahaan (APINDO) agar menjaga harmonisasi dalam lingkup pekerjaan

3.4 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN – SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 didukung 5 (lima) Program 4 (empat) ., dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan.

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Pelatihan Kerja dan Prokdutivitas Tenaga Kerja	20	20	%
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	20	20	%
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
	Input : Anggaran	1.918.744.524	1.918.744.524	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Output : Persentase pencaker terlatih yang bersertifikat kompetensi	100%	100%	100%
	Outcome :			
2	Program : Penempatan Tenaga Kerja	62.09	73.14	123%
	Kegiatan : Persentase Pelindungan PMI (Pradan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	62.09	62.09	100%
	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	300 orang	300 orang	100%
	Input : Anggaran	56.973.700	56.182.000	98,61
	Output : Jumlah Aplikasi pelayanan informasi pasar kerja online pemerintah	2 Aplikasi	3 Aplikasi	150
	Outcome : Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	1.000 Orang	1.951 Orang	195,1

Dokumentasi Kegiatan Bursa Kerja Tahun 2023



Sumber : Bidang Penempatan

Dalam mendukung sasaran 1 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Tahun 2023



Sedangkan dalam kegiatan yang mendukung penempatan tenaga kerja dengan melaksanakan kegiatan bursa kerja serta bursa kerja khusus (BKK).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Hubungan Industrial			
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100	100	%
	Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	%
	Input : Anggaran	520.513.000	520.513.000	100%
	Output : Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	35 Kasus	35 Kasus	100
	Outcome : Presentase penyelesaian kasus Hubungan Industrial	100%	100%	100

Dalam mendukung sasaran strategis 3 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan cara memediasi kasus antara pekerja dan perusahaan. Tidak jarang terjadi keributan antara pekerja dan perusahaan karena tidak menemui titik kesepakatan. Untuk jumlah kasus yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 35 kasus. Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah kasus yang masuk jauh menurun. Ini menunjukkan keadaan yang baik karena mencerminkan hubungan antara pekerja dan perusahaan terbilang harmonis.

Dokumentasi Sidang Mediasi



Sumber : Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

3.5 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	100%	80,14	Efisien
	195,10%	98,61	Efisien
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	86,67%	73,47	Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berjumlah 79 orang dengan rincian 8 pejabat struktural, 19 fungsional tertentu, 18 fungsional umum, 34 Non ASN.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dengan rata- rata capaian 100%.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 17.606.113.459.- Anggaran tersebut bersumber dari APBD, DBH CHT, Pengendalian Dampak Inflasi Kota Bekasi .

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 17.606.113.459.-
2. Belanja Modal sebesar Rp – (Tidak ada belanja modal)

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) program dan 15 (lima belas) sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Kegiatan:			
	Perencanaan ,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
2	Kegiatan:	11.228.405.000	9.882.016.497	88,01%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan:	11.228.405.000	11.228.405.000	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
3	Kegiatan:			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.925.000	383.013.000	99,41%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Komponen Insatalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100%
	Penyedian banah logistik kantor	324.925.000	323.013.000	93,57%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	34.999.800	100%
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan			
	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22.000.000	14.996.180	68,16%
4	Kegiatan :			
	-Penyediaan Jasa Penunjang			
	Urusan Pemerintah Daerah	2.478.830.935	2.478.830.935	95,31%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	8.610.000	57,40%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	338.400.000	249.616.681	73,76%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.125.430.935	2.104.439.679	99,01%
5	Kegiatan :			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	586.400.000	534.252.353	91,11 %
	Sub Kegiatan :			
	Peyendiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharran dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.400.000	127.801.053	94.39 %
	Peyendiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan	26.000.000	21.624.800	83,17%
	Dinas dan Operasional Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	100%
II	Program: Pelatihan Kerja dan Prokduktivitas Tenaga Kerja			
1	Kegiatan:			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.659.239.524	1.659.239.524	99,07%
	Sub Kegiatan :			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.659.239.524	1.643.838.100	99,07%
2	Kegiatan:			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.455.000	18.082.000	92.94 %
	Sub Kegiatan :			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.455.000	18.082.000	92.94 %
III	Program: Penempatan Tenaga Kerja			
1	Kegiatan:			
	-Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	51.890.000	50.818.000	97.93%
	Sub Kegiatan :			
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pencari Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	51.890.000	50.818.000	97.93%
2	Kegiatan:			
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	97.385.000	43.708.000	44.88 %
	Sub Kegiatan :			
	Job Fair/Bursa Kerja	97.385.000	43.708.000	44.88 %
IV	Program: Hubungan Industrial			
1	Kegiatan:			
	Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	520.513.000	443.133.000	85.13 %
	Sub Kegiatan :			
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	322.019.000	288.025.000	89,44%
	Sub Kegiatan :			
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	79.079.000	54.337.000	68,71%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	Kegiatan:	119.415.000	119.415.000	84,39%
	Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	119.415.000	119.415.000	84,39%
TOTAL		17.606.113.459	15.868.060.040	90.13%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.868.060.040 dari total anggaran Rp. 17.606.113.459 atau 90.13%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2018-2023. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Memuaskan karena dari 2 (dua) indikator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan dan 1 (satu) indikator dalam kategori Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp15.868.060.040. (90.13%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Anggaran APBD yang dimiliki masih belum sepenuhnya mendukung kegiatan.
2. Sumber Daya Manusia yang minim.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Anggaran APBD mampu mendukung kegiatan yang ada.
2. Tambahan pegawai sebagai pelaksana kegiatan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

LAMPIRAN

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai Akip Dinas Tenaga Kerja							Nilai Akip Dinas Tenaga Kerja		80	62.48	80	64.2	80		80			
								Indeks Kepuasan masyarakat											
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Optimalisasi Disiplin Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	16.880.690.325	100%	16.880.690.325	100%	16.880.690.325	100%	16.880.690.325	Disnaker	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penin gkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	10.000.00 0	100%	7.500.000	100%	20.000.000			Disnake r	Kota Bekasi	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Sakip, Renja, Lakip		3 Laporan	7000.000	3 Laporan	7.000.000	3 Laporan	20.000.000	100 %	25.000.000	Disnaker	Kota Bekasi	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	50.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100 %	225.000.00 0	Disnaker	Kota Bekasi	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Bimtek		20 orang	50.000.000	5 orang	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.00 0	Disnaker	Kota Bekasi	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan		20 orang		20 orang	25.000.000	20 orang	25.000.000	20 orang	25.000.000	Disnaker	Kota Bekasi	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan		100%	13.166.738.0 00	100%	12.381.533.0 00	100%	0	100%	12.381.533 .000	Disnaker	Kota Bekasi	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Capaian Kinerja dan Keuangan												
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Tunjangan dan Premi BPJS		780 orang/bulan	13.156.738.000	63 orang/bulan	12.374.033.000	100 %	0	100 %	12.374.033.000	Disnaker	Kota Bekasi
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Akhir Tahun 2. Jumlah Laporan Semester		1 dokumen 2 laporan	10.000.000	-1 dokumen 2 laporan	- 10.000.000	Dokumen 2 laporan	0	Dokumen 2 laporan	10.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan		-3 laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	750.272.000	100%	490.000.000	100%	0	100 %	400.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan		282 unit	15.000.000	330 buah	10.000.000	330 buah	10.000.000	330 buah	10.000.000	Disnaker	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGULANGAN JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah alat tulis kantor dan bahan komputer 2. Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan 3. Jumlah Materai		4210 Unit 1200 Pak	322.800.000	3.948 unit/buah 2355 Pak 300 Buah	260.000.000	948 unit/buah 2355 Pak 300 Buah	260.000.000	948 unit/buah 2355 Pak 300 Buah		Disnaker	Kota Bekasi
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah Barang cetak 2. Jumlah Penggandaan / Jilid 3. Jumlah Spanduk		4.592 Unit 28.200 Lembar 55 Unit	150.000.000	1999 unit 25130 lembar 46 unit	100.000.000	1999 unit 25130 lembar 46 unit	100.000.000	1999 unit 25130 lembar 46 unit		Disnaker	Kota Bekasi
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan		14656 Buku/Exemplar	87.500.000	7948 eksemplar	50.000.000	7948 eksemplar	50.000.000	7948 eksemplar	50.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah / perjalanan dinas		341 Kali	174.972.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000	Disnaker	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.084.936.000	100%	845.000.000	100%	1846.000.000	100%	845.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar / pelumas Jumlah kendaraan dinas / operasional		9000 liter 14 unit	299.991.000	9000 liter 14 unit	299.991.000	9000 liter 14 unit	299.991.000	9000 liter 14 unit	299.991.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar / pelumas Jumlah kendaraan dinas / operasional		1600 liter 2 unit	40.000.000	1600 liter 2 unit	40.000.000	1600 liter 2 unit	40.000.000	1600 liter 2 unit	40.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor		6489 m2	500.000.000	6489 m2	500.000.000	6489 m2	500.000.000	6489 m2	500.000.000	Disnaker	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor			284.945.0 00	-	-	0	0	0	0	Disnake r	Kota Bekasi
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		-	-	150 unit	120.000.0 00					Disnake r	Kota Bekasi
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	428.000. 000	100%	428.000. 000	100%	428.000.000	100%	428.00 0.000	Disnake r	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal		24 unit	428.000. 000	24 unit	428.000.0 00	24 unit	428.000.000	24 unit	428.00 0.000	Disnake r	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	2.466.94 2.750	100%	2.503.65 7.325					Disnak er	Kota Bekasi
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik		84 rekening / bulan	323.998.7 50	84 rekenin g	343.715.7 50	84 rekenin g	343.715.750	84 rekening	343.71 5.750	Disnake r	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan Jumlah tenaga administrasi/tekni s perkantoran yang disediakan,		72 orang/bulan 60 orang/bulan 396 orang/bulan	2.132.944.000	72 orang/bulan 60 orang/bulan 396 orang/bulan	2.154.941.575	72 orang/bulan 60 orang/bulan 396 orang/bulan	2.154.941.575	72 orang/bulan 60 orang/bulan 396 orang/bulan	2.154.941.575	Disnaker	Kota Bekasi
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen / Surat Dinas Terkirim		230 Surat	10.000.000	114 surat 5.000.000	230 Surat 5.000.000	230 Surat 5.000.000	230 Surat 5.000.000	230 Surat 5.000.000	230 Surat 5.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
Mewujudkan Prroduktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian	Meningkatkan lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan						Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase penurunan angka pengangguran terbuka		8.96 %	10.68%	8.96%	10.88%	8,79 %				Disnaker	Kota Bekasi
	Meningkatnya Lapangan Kerja Baru Yang Produktif							Presentase tenaga yang berkompeten yang siap ditempatkan		20 %		20 %		20 %				Disnaker	Kota Bekasi
							Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Tenaga Kerja Daerah (RTKD)		0	0	0	0	dokumen	200.000.000	dok	200.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja		100%	233.299.900	100 %	233.299.900	100%	233.299.900	1 Dok	233.299.900	Disnaker	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja		100 %	398.299. 900	100 %	233.299. 900	100 %	233.299.900	100 %	233.29 9.900	Disnake r	Kota Bekasi
								Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				398.299.9 00							Disnake r	
									Jumlah pelajar SMK peserta pembekalan soft skill		30 BKK 1500 orang	100.000.0 00	30 BKK 1500 orang	100.000. 000	30 BKK 1500 orang	100.000.000	30 BKK 1500 orang	100.00 0.000	Disnake r	
									Jumlah wirausahawan yang terlatih		20 orang	150.000.0 00	20 orang	150.000. 000	20 orang	150.000.000	20 org	150.00 0.000	Disnake r	Kota Bekasi
									Jumlah wirausahawan yang melakukan konsultasi produktivitas		25 orang	150.000.0 00	25 orang	150.000. 000	25 orang	150.000.000	25 orang		Disnake r	Kota Bekasi
									Jumlah peserta Pola Magang di perusahaan		20 orang	100.000.0 00	70 orang	200.000. 000	70 orang	200.000.000	70 orang	200.00 0.000	Disnake r	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Terlaksananya pemberian konsultasi produktivitas			175 org	175.000.000	175 org	175.000.000	175 org	175.000.000	175 org	175.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
								Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi			200 orang	1.200.000.000	200 orang	1.200.000.000	200 org	1.200.000.000	200 org	1.200.000.000	Disnaker	
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas dan daya saing bagi dunia usaha baru			50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan BLK yang dibuat			1 Dok	300.000.000	1 dokumen / FS	300.000.000	0	0	0	0	Disnaker	
							Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase produktivitas tenaga kerja			50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
							Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Meningkatnya produktivitas kerja pada perusahaan kecil, menengah, dan UMKM melalui bimbingan konsultasi produktivitas	0	0			40 orang	50.000.000	100 org	203.000.000	200 org	250.000.000	Disnaker	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapat sosialisasi			0	40 Lemba ga	40.000.000	0	0	0	0	Disnak er	
								Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapat sosialisasi			0	40 Lemba ga	40.000.000	0	0	0	0	Disnake r	
								Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a											Disnake r	
								Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terstandarisasi kompetensi peningkatan produktivitasnya				25 orang	75.000.000	25 org	75.000.000	25 org	75.000.000	Disnake r	
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan		61,22%		61,78%						Disnake r	
								Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Kepada BKK, Jumlah sertifikat Surveillance ISO			407.000.000	100%	200.000.000	100 %	407.000.000	100 %	407.000.000	Disnak er	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								9001:2015 (Pelayanan Kartu AK.1 dan Penempatan												
								Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015		1 sertifikat		1 sertifikat						Disnaker	
									Jumlah Pelaksanaan Job Fair Tk. SMK dan job fair tingkat kota bekasi		1 kali	100.000.000	1 kl	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kl	100.000.000	Disnaker	Kota Bekasi
									Jumlah BKK peserta Sosialisasi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016		50 BKK	100.000.000	50 BKK	100.000.000	50 bkk	100.000.000	50 bkk	100.000.000	Disnaker	
								Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			95 CPMI	75.000.000	95 CPMI	75.000.000	95 CPMI	75.000.000	95 CPMI	75.000.000	Disnaker	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlayannya Administrasi CPMI dan P3MI					30 perusahaan	75.000.000					Disnaker	
							Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			95 org	175.000.000	95 org	175.000.000	95 org	175.000.000	95 org	175.000.000	Disnaker		
							Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja				1500 orang	207.000.000					Disnaker		
	Menurunnya Sengketa Pengusaha dengan Pekerja							Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja										Disnaker	Kota Bekasi	
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja		100%			525.000.000					Disnaker	Kota Bekasi	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja			400.000.000		525.000.000						Disnaker	Kota Bekasi
							Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						425.000.000						Disnaker	
								Terlaksananya Peringatan Hari Buruh Tingkat Kota Bekasi		1 event	100.000.000	1 event	100.000.000	1 event	100.000.000	1 event	100.000.000	1 event	Disnaker	
								Terlaksananya FGD LKS Bipartit		25 Perusahaan	150.000.000	25 Perusahaan	100.000.000	25 Perusahaan	100.000.000	25 Perusahaan	100.000.000	25 Perusahaan	Disnaker	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan)						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2018)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
											2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Terlaksananya FGD Struktur dan Skala Upah		0	0	50 Perusah aan	150.000. 000	50 Perusah aan	150.000.000	50 Perusahaa n	150.00 0.000	Disnake r		
								Terlaksananya Rekomendasi UMK (DEPEKO) Tahun 2023		1 Rekomendas i	250.000.0 00	1 Rekom endasi	250.000.0 00	1 Rekome ndasi	250.000.000	1 Rekomen dasi	250.00 0.000	Disnake r		